

KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR TENTANG IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN

Oleh:

Nurdin¹

Hanyfa Shofia Azahra Zulfa²

Fuad Abdul Basits Setiawan³

Nurkhaeratunnisa⁴

Ryan Mukhtari Fadli⁵

Universitas Pendidikan Indonesia

Alamat: JL. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat
(40154).

Korespondensi Penulis: hshofiaz@upi.edu

Abstract. *The school zoning policy in Indonesia was introduced as an effort to improve access and equity in education for all students. This research aims to analyze the implementation of the zoning policy, the challenges faced, and its impact on the quality of education in various regions. The method used in this study is a literature review, examining various academic sources and policies related to zoning. The findings indicate that although this policy has the potential to create fairness in education, its execution is often hindered by disparities in quality among schools and community resistance. The implications of this research emphasize the need for stronger government support and community involvement in the education process to effectively achieve the goal of improving education quality. This study is expected to serve as a reference for policymakers and education practitioners in formulating better implementation strategies for zoning policies in the future.*

Keywords: *Equity In Education, Zoning Poilicy.*

KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR TENTANG IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN

Abstrak. Kebijakan zonasi sekolah di Indonesia diperkenalkan sebagai upaya untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi semua siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan zonasi, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap mutu pendidikan di berbagai daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber akademik dan kebijakan terkait zonasi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini berpotensi untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan, pelaksanaannya sering terhambat oleh disparitas kualitas antar sekolah dan resistensi masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya dukungan pemerintah yang lebih kuat dan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan dalam merumuskan strategi implementasi kebijakan zonasi yang lebih baik di masa mendatang.

Kata kunci: Kebijakan Zonasi, Mutu Pendidikan.

LATAR BELAKANG

Kebijakan zonasi sekolah di Indonesia telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan. Kebijakan ini dimulai pada tahun 2017 dengan tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Melalui sistem zonasi, siswa diharapkan dapat mendaftar di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga mengurangi perjalanan yang panjang dan biaya transportasi (Haryanti, 2020; Oktaviari, 2020). Kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang mendorong pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak di Indonesia.

Meskipun niat baik dari kebijakan zonasi sudah jelas, implementasinya tidak berjalan mulus. Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini, termasuk resistensi dari masyarakat, perbedaan kualitas sekolah, dan infrastruktur yang tidak merata. Orang tua sering kali merasa bahwa kebijakan ini membatasi kebebasan mereka untuk memilih sekolah terbaik untuk anak-anak mereka, terutama sekolah-sekolah yang sudah memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat (Ula & Lestari, 2020; Mahpudin,

2020). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakpuasan di kalangan orang tua dan siswa terhadap sistem yang baru diperkenalkan ini.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam implementasi zonasi adalah kualitas pendidikan yang beragam di berbagai daerah. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik dan tenaga pengajar yang lebih berkualitas dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil (Darwis, 2020; Widyastuti, 2020). Hal ini menciptakan ketidakmerataan dalam mutu pendidikan yang diterima oleh siswa, di mana siswa di daerah perkotaan masih memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di daerah pedesaan.

Lebih jauh, kebijakan zonasi dapat memicu praktik manipulasi domisili, di mana orang tua berpura-pura tinggal di area zonasi yang diinginkan untuk mendapatkan akses ke sekolah yang lebih baik (Nanggala, 2020; Haryanti, 2020). Praktik ini tidak hanya merugikan siswa yang benar-benar tinggal di area tersebut, tetapi juga menciptakan kesenjangan yang lebih dalam dalam sistem pendidikan. Selain itu, siswa yang terpaksa bersekolah di sekolah dengan kualitas rendah dapat mengalami dampak negatif terhadap prestasi akademis dan pengembangan diri mereka.

Dari sudut pandang kebijakan, meskipun zonasi bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan masih dipertanyakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah pendaftar di sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati meningkat, kualitas pendidikan yang diberikan tidak serta merta meningkat (Ula & Lestari, 2020; Widyaningtyas et al., 2021). Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menilai kembali strategi implementasi zonasi agar tidak hanya fokus pada peningkatan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Gap research yang signifikan juga teridentifikasi dalam literatur terkait kebijakan zonasi. Banyak studi yang menyoroti masalah dalam implementasi, tetapi masih sedikit yang meneliti secara mendalam tentang bagaimana kebijakan ini dapat diperbaiki untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam pendidikan (Mahpudin, 2020; Widyastuti, 2020). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan dan kegagalan kebijakan ini serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR TENTANG IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN

Mengidentifikasi dan memahami dampak jangka panjang dari kebijakan zonasi terhadap mutu pendidikan juga menjadi penting. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan zonasi diharapkan dapat menciptakan pemerataan pendidikan, realitas yang terjadi di lapangan sering kali berbeda (Darwis, 2020; Oktaviari, 2020). Kualitas pengajaran, metode pembelajaran, dan motivasi siswa menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan ini.

Dengan adanya isu-isu ini, penelitian lebih lanjut tentang kebijakan zonasi sekolah menjadi sangat relevan dan diperlukan. Kajian ini tidak hanya akan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, tetapi juga akan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang tantangan yang ada serta merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Kebijakan zonasi juga menjadi penting dalam konteks memperkuat sistem pendidikan nasional yang inklusif. Dengan memperhatikan keberagaman wilayah di Indonesia, zonasi diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada daerah yang kurang terlayani. Namun, meskipun terdapat inisiatif ini, masih banyak sekolah di daerah terpencil yang menghadapi masalah serius dalam hal infrastruktur dan sumber daya. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitas dan pelatihan guru berdampak langsung pada mutu pendidikan yang diterima oleh siswa di daerah tersebut (Haryanti, 2020; Isnaeni & Raharjo, 2019).

Di sisi lain, efektivitas kebijakan zonasi juga perlu dievaluasi dari perspektif partisipasi masyarakat. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Namun, banyak orang tua yang merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan zonasi, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap sekolah yang mereka pilih. Penelitian oleh Nanggala (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, keterlibatan orang tua dalam sistem zonasi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan ini.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah keberlanjutan program zonasi itu sendiri. Mengingat bahwa kebijakan pendidikan sering kali mengalami perubahan,

penting untuk memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang jelas untuk mengukur dampak kebijakan zonasi dari waktu ke waktu. Tanpa adanya pemantauan yang efektif, akan sulit untuk mengetahui apakah kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan berbasis data dan evaluasi berkelanjutan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait kebijakan pendidikan (Darwis, 2020) (Ula & Lestari, 2020).

Lebih jauh, tantangan yang dihadapi oleh kebijakan zonasi juga berkaitan dengan pengembangan profesionalisme guru. Sering kali, guru di sekolah-sekolah di daerah terpencil kurang mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang memadai. Hal ini berpengaruh pada metode pengajaran yang digunakan, serta kemampuan mereka dalam menghadapi beragam kebutuhan siswa. Oleh karena itu, program peningkatan kapasitas guru menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan zonasi dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan (Widyaningtyas et al., 2021; Oktaviari, 2020).

Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, penelitian mengenai kebijakan zonasi sekolah di Indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan zonasi tetapi juga untuk memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan di masa mendatang. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis data, diharapkan kebijakan zonasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, sehingga semua siswa, tanpa memandang latar belakang dan lokasi geografis, dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas (Haryanti, 2020).

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Zonasi Sekolah: Sejarah dan Landasan Teoretis

Kebijakan zonasi sekolah di Indonesia mulai diperkenalkan sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan dalam akses pendidikan. Sejak diterapkan secara resmi pada tahun 2017, kebijakan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa memandang status ekonomi atau lokasi geografis. Menurut Dewi (2019), kebijakan ini berakar dari pemikiran mengenai keadilan sosial dan pemerataan pendidikan, di mana setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR TENTANG IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN

Landasan teoritis dari kebijakan ini juga berkaitan dengan teori keadilan distributif, yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya pendidikan secara adil kepada semua siswa. Sen (1999) menggarisbawahi bahwa kebijakan pendidikan harus mengedepankan prinsip keadilan, di mana semua anak, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka, harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di lingkungan yang kondusif. Konsep zonasi menjadi salah satu upaya nyata untuk mewujudkan prinsip tersebut dalam konteks pendidikan di Indonesia.

Namun, meskipun kebijakan zonasi memiliki niat baik, implementasinya seringkali menghadapi berbagai tantangan. Haryanto (2020) menyatakan bahwa resistensi dari masyarakat, terutama orang tua, menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan kebijakan ini. Banyak orang tua yang khawatir bahwa zonasi akan membatasi pilihan sekolah anak-anak mereka, terutama jika sekolah yang ditunjuk tidak memiliki reputasi yang baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika sosial yang melatarbelakangi penerimaan kebijakan ini di masyarakat.

Implementasi Sistem Zonasi: Tantangan dan Hambatan

Implementasi kebijakan zonasi sekolah tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Isnaeni dan Raharjo (2019) mencatat bahwa meskipun pemerintah telah mengatur kebijakan zonasi, penerapannya di lapangan seringkali tidak konsisten. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang memadai mengenai tujuan dan mekanisme kebijakan, yang menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan sekolah.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi zonasi adalah disparitas kualitas antara sekolah-sekolah yang berada dalam satu zona. Widyastuti (2020) menjelaskan bahwa meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akses pendidikan, kualitas pendidikan di sekolah-sekolah zonasi tidak selalu setara. Beberapa sekolah mungkin memiliki fasilitas yang baik dan pengajaran yang berkualitas, sementara yang lain masih kekurangan sumber daya. Ketidaksetaraan ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan zonasi dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan orang tua dan siswa.

Tantangan lainnya adalah adanya tekanan dari pihak tertentu yang menginginkan kebebasan memilih sekolah. Banyak orang tua merasa bahwa mereka berhak untuk

menentukan sekolah mana yang terbaik untuk anak-anak mereka. Nanggala (2020) menegaskan bahwa jika kebijakan zonasi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan di semua sekolah, maka akan ada ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan.

Pengaruh Zonasi terhadap Mutu Pendidikan

Pengaruh kebijakan zonasi terhadap mutu pendidikan di Indonesia menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Mahpudin (2020) mencatat bahwa meskipun zonasi bertujuan untuk meningkatkan akses, dampaknya terhadap kualitas pendidikan bervariasi. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang mendapatkan siswa dari zonasi seringkali merasa terdorong untuk meningkatkan mutu pengajaran mereka. Namun, tidak semua sekolah mampu melakukan peningkatan ini secara konsisten.

Sebuah studi oleh Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di sekolah-sekolah zonasi sangat tergantung pada faktor internal seperti kepemimpinan sekolah, kompetensi guru, dan sumber daya yang tersedia. Sekolah yang memiliki pemimpin yang visioner dan guru yang berkualitas cenderung menunjukkan hasil belajar yang lebih baik. Sebaliknya, sekolah dengan manajemen yang lemah dan guru yang kurang berpengalaman menghadapi kesulitan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Hasil penelitian juga mengindikasikan adanya pergeseran dalam paradigma pendidikan, di mana sekolah-sekolah dituntut untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sari (2020) menekankan bahwa kebijakan zonasi memicu sekolah untuk bersaing dalam hal mutu, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada perbaikan hasil belajar siswa. Namun, hal ini memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat agar seluruh sistem pendidikan dapat berkembang secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan *system* zonasi sekolah yang sudah di implementasikan di berbagai daerah serta dampak dari penerapannya terhadap mutu Pendidikan. Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan berbagai

KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR TENTANG IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN

sumber, termasuk jurnal ilmiah, laporan penelitian, kebijakan pemerintah, buku dan dokumen resmi yang relevan dengan kebijakan zonasi sekolah di Indonesia.

Pencarian data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti "zonasi sekolah", "mutu pendidikan", dan "implementasi kebijakan". Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten dengan cara membandingkan informasi dari sejumlah dokumen atau literatur ilmiah yang berkaitan dengan tema implementasi dan dampak kebijakan zonasi sekolah. Peneliti juga menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dampak kebijakan terhadap mutu pendidikan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi secara komprehensif. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk memahami secara mendalam implikasi kebijakan zonasi terhadap sistem pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi literatur. Data yang dikumpulkan mencakup artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan sumber-sumber akademik lainnya yang membahas kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian literatur di berbagai database akademik, termasuk Google Scholar, JSTOR, dan Repositori.

Rentang waktu penelitian ini berlangsung dari September 2024 hingga Oktober 2024. Penelitian ini mencakup literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu 2017 hingga 2023, sehingga dapat mencakup berbagai perspektif dan perkembangan terkini terkait kebijakan zonasi sekolah di Indonesia. Lokasi penelitian ini terfokus pada konteks pendidikan di Indonesia, dengan perhatian khusus pada daerah-daerah yang menera.

Hasil analisis data menunjukkan adanya variasi dalam implementasi dan dampak kebijakan zonasi di berbagai daerah. Tabel 1 menyajikan ringkasan temuan dari beberapa penelitian yang dianalisis, menunjukkan persentase akses dan mutu pendidikan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan zonasi.

Tabel 1. Perbandingan Akses dan Mutu Pendidikan Sebelum dan Sesudah Penerapan Kebijakan Zonasi di Beberapa Daerah

Daerah	Akses Pendidikan Sebelum Zonasi (%)	Akses Pendidikan Sesudah Zonasi (%)	Mutu Pendidikan Sebelum Zonasi	Mutu Pendidikan Sesudah Zonasi
Jakarta	65	85	C	B
Yogyakarta	55	75	C	C
Surabaya	70	90	B	A
Bandung	60	80	C	B

Sumber: (Haryanti, 2020; Widyastuti, 2020; Nanggala, 2020).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan zonasi telah berhasil meningkatkan akses pendidikan di sebagian besar daerah, khususnya di Jakarta dan Surabaya. Peningkatan akses ini sejalan dengan teori keadilan sosial, yang menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang setara. Namun, peningkatan mutu pendidikan tidak selalu sejalan dengan peningkatan akses. Misalnya, meskipun Yogyakarta menunjukkan peningkatan akses yang signifikan, mutu pendidikan di daerah tersebut tetap stagnan (C). Ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi perlu disertai dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan yang lebih komprehensif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebijakan zonasi dapat meningkatkan akses pendidikan (Mahpudin, 2020; Isnaeni & Raharjo, 2019). Namun, ada pertentangan dalam hal dampak terhadap mutu pendidikan. Penelitian oleh Widyastuti (2020) menyatakan bahwa meskipun akses meningkat, kualitas pendidikan tidak serta-merta mengikuti. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan zonasi memiliki tujuan yang baik, implementasinya harus mempertimbangkan berbagai faktor lain yang memengaruhi mutu pendidikan.

Implikasi dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu teoritis dan terapan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang hubungan antara kebijakan pendidikan dan mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan

KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR TENTANG IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN

pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Secara terapan, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, seperti pelatihan guru dan penyediaan fasilitas yang memadai di sekolah-sekolah zonasi. Selain itu, sosialisasi yang lebih baik tentang kebijakan zonasi kepada masyarakat juga sangat penting untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kebijakan Zonasi Sekolah: Sejarah dan Landasan Teoretis

Kebijakan zonasi sekolah di Indonesia mulai diperkenalkan sebagai langkah strategis untuk mengatasi ketidakmerataan akses pendidikan. Sebelumnya, sistem penerimaan siswa baru yang berbasis prestasi sering kali menguntungkan sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil dan kurang berkembang sering kali kekurangan siswa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 menandai awal dari kebijakan ini, yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih adil kepada semua siswa tanpa memandang lokasi tempat tinggal mereka (Haryanti, 2020; Mahpudin, 2020).

Landasan teoretis kebijakan ini berakar pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesempatan pendidikan. Menurut teori keadilan sosial, setiap individu berhak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial atau geografis. Kebijakan zonasi dirancang untuk meminimalkan kesenjangan ini dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif. Namun, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus, dengan berbagai kendala yang perlu diatasi (Oktaviari, 2020).

Salah satu tantangan yang muncul adalah penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Masyarakat sering kali skeptis terhadap efektivitas zonasi, terutama ketika mereka merasa kebebasan memilih sekolah untuk anak-anak mereka dibatasi. Penelitian oleh Widyaningtyas et al. (2021) menunjukkan bahwa meskipun ada manfaat yang jelas dari kebijakan zonasi, seperti peningkatan akses, resistensi masyarakat dapat menghalangi efektivitasnya. Ini menunjukkan bahwa penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan agar lebih diterima (Widyaningtyas et al., 2021).

Ketidakpuasan masyarakat ini sering kali diakibatkan oleh kurangnya pemahaman tentang tujuan dan manfaat kebijakan zonasi. Oleh karena itu, kampanye informasi yang lebih baik diperlukan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan ini dapat meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas. Sebuah studi oleh Ula dan Lestari (2020) merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan mekanisme zonasi dan manfaat yang dapat diperoleh dari kebijakan ini.

Pada akhirnya, meskipun kebijakan zonasi sekolah memiliki tujuan yang mulia, efektivitasnya sangat bergantung pada penerimaan dan dukungan masyarakat. Upaya untuk menjelaskan dan melibatkan masyarakat dalam implementasi kebijakan ini akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih adil dan merata di Indonesia. Penelitian lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan ini diterima di berbagai daerah dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan di masa mendatang (Mahpudin, 2020; Oktaviari, 2020).

Implementasi Sistem Zonasi: Tantangan dan Hambatan

Implementasi sistem zonasi di sekolah-sekolah Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keberagaman kondisi sosial-ekonomi di berbagai daerah. Penelitian oleh Haryanti (2020) menunjukkan bahwa di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat terbatas. Dalam konteks ini, zonasi tidak selalu menjamin bahwa siswa dari daerah tersebut akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, karena sering kali kualitas sekolah yang ada di zona tersebut masih rendah (Haryanti, 2020).

Di samping itu, permasalahan lainnya adalah adanya praktik manipulasi domisili. Banyak orang tua yang berusaha untuk menciptakan alamat fiktif agar anak mereka bisa diterima di sekolah yang lebih baik, meskipun itu berarti mereka harus berpindah tempat tinggal. Penelitian oleh Nanggala (2020) menunjukkan bahwa ini bukan hanya melanggar etika, tetapi juga mengganggu integritas sistem pendidikan itu sendiri. Praktik ini mencerminkan ketidakpuasan orang tua terhadap kebijakan zonasi dan menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk mendaftarkan anak mereka di sekolah yang memiliki reputasi baik (Nanggala, 2020).

KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR TENTANG IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak sekolah di daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Penelitian oleh Widyastuti (2020) mengungkapkan bahwa banyak sekolah yang terletak dalam zona yang diharapkan akan diuntungkan oleh kebijakan zonasi, justru menghadapi masalah serius dalam hal sarana dan prasarana. Hal ini menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan yang lebih besar, karena siswa di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan pendidikan yang setara dengan siswa di daerah perkotaan.

Selain itu, rendahnya kualitas guru juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan zonasi. Penelitian oleh Isnaeni dan Raharjo (2019) menunjukkan bahwa banyak guru di daerah pedesaan yang kurang mendapatkan pelatihan dan dukungan, yang berdampak pada metode pengajaran dan hasil belajar siswa. Kualitas pengajaran yang bervariasi ini memperburuk masalah ketidakmerataan pendidikan yang ingin diatasi oleh kebijakan zonasi.

Menghadapi tantangan ini, penting untuk memiliki strategi yang jelas dan komprehensif dalam implementasi kebijakan zonasi. Ini termasuk peningkatan infrastruktur sekolah, pelatihan bagi guru, dan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar lebih terlibat dalam proses pendidikan. Penelitian oleh Darwis (2020) menyarankan agar pemerintah memberikan dukungan yang lebih besar untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Darwis, 2020).

Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, kebijakan zonasi diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dalam memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa, tanpa terkecuali. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai hambatan yang ada (Ula & Lestari, 2020; Widyastuti, 2020).

Pengaruh Zonasi terhadap Mutu Pendidikan

Pengaruh kebijakan zonasi terhadap mutu pendidikan di Indonesia telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam literatur pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zonasi tidak serta-merta menghasilkan peningkatan mutu pendidikan. Misalnya, Darwis (2020) menyatakan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah siswa di sekolah-sekolah zonasi, tidak ada jaminan bahwa kualitas pembelajaran yang diterima siswa juga

meningkat. Penelitian ini mencatat bahwa faktor-faktor lain, seperti kualitas pengajaran dan fasilitas sekolah, sangat berperan dalam menentukan hasil belajar siswa (Darwis, 2020).

Lebih lanjut, studi oleh Isnaeni dan Raharjo (2019) menunjukkan bahwa meskipun zonasi dirancang untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, kualitas pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah tertentu masih sangat bervariasi. Di banyak daerah, sekolah-sekolah di bawah sistem zonasi menghadapi kendala dalam hal kurikulum, pelatihan guru, dan dukungan sumber daya, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap hasil belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan harus menjadi fokus utama dalam evaluasi kebijakan zonasi (Isnaeni & Raharjo, 2019).

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa pengaruh zonasi tidak hanya terletak pada aksesibilitas sekolah, tetapi juga pada bagaimana proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Widyastuti (2020) menemukan bahwa metode pengajaran yang digunakan oleh guru di sekolah zonasi sering kali tidak memadai, yang berkontribusi pada rendahnya motivasi belajar siswa. Hal ini dapat mengarah pada hasil akademik yang buruk dan pada gilirannya mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Namun, tidak semua dampak zonasi bersifat negatif. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Haryanti (2020), menunjukkan bahwa kebijakan zonasi telah berhasil meningkatkan jumlah pendaftar di sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati, terutama di daerah yang lebih terisolasi. Dengan meningkatnya jumlah siswa, sekolah-sekolah ini memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan dana dan dukungan dari pemerintah, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan (Haryanti, 2020).

Namun, untuk mencapai tujuan kebijakan zonasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Penelitian oleh Nanggala (2020) menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, serta perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah zonasi. Tanpa perbaikan ini, kebijakan zonasi berisiko hanya menjadi alat untuk mendistribusikan siswa, bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

Kesimpulannya, meskipun kebijakan zonasi memiliki potensi untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia, dampaknya terhadap mutu pendidikan

KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR TENTANG IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN

masih memerlukan perhatian dan evaluasi yang lebih mendalam. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara komprehensif bagaimana kebijakan ini dapat diperbaiki dan dioptimalkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di seluruh Indonesia (Darwis, 2020; Widyastuti, 2020; Isnaeni & Raharjo, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan zonasi sekolah di Indonesia memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan yang lebih adil dan merata. Namun, efektivitas kebijakan ini masih diwarnai oleh berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil menarik perhatian pada kesenjangan pendidikan dan mendorong partisipasi yang lebih besar dari siswa di daerah yang sebelumnya kurang terlayani. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan baik, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai harapan akibat resistensi masyarakat dan variasi kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang terletak dalam zona yang sama.

Lebih lanjut, pengaruh kebijakan zonasi terhadap mutu pendidikan sangat bervariasi dan bergantung pada beberapa faktor, termasuk kualitas pengajaran, fasilitas yang tersedia, dan dukungan yang diberikan kepada sekolah-sekolah zonasi. Meskipun ada peningkatan akses, kualitas pendidikan yang diterima siswa di berbagai sekolah masih jauh dari merata. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap pelatihan guru, perbaikan infrastruktur, dan dukungan untuk sekolah-sekolah yang terletak di daerah terpencil.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan dampak positif dari kebijakan zonasi, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Penyusunan program pelatihan bagi guru, penyediaan sumber daya yang cukup, dan sosialisasi yang lebih baik mengenai manfaat kebijakan zonasi adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Selain itu, evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan zonasi benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan bagi semua siswa di Indonesia.

Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut mengenai pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan zonasi dapat memberikan wawasan yang berharga untuk memperbaiki kebijakan di masa depan. Hal ini juga penting untuk menciptakan sistem

pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua siswa. Dengan demikian, kebijakan zonasi dapat berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan di Indonesia.

Secara keseluruhan, kebijakan zonasi sekolah merupakan langkah yang penting dan strategis, namun implementasinya memerlukan perhatian yang lebih besar terhadap konteks sosial dan ekonomi yang ada. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan ini tercapai dan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua siswa di seluruh Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Brusilovsky, P., & Millán, E. (2019). *User Modeling for Adaptation and Personalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dewi, S. (2019). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haryanto, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Isnaeni, E., & Raharjo, S. (2019). Analisis Dampak Kebijakan Zonasi terhadap Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 12(1), 45-56.
- Kaldijah, U. (2020). Kebijakan Zonasi Sekolah: Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 45-60.
- Mahpudin, A. (2020). Kualitas Pendidikan di Era Kebijakan Zonasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(2), 25-34.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340-363.
- Nanggala, R. (2020). Evaluasi Kebijakan Zonasi Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(3), 67-78.
- Prasetyo, H. (2021). Pengaruh Kebijakan Zonasi Sekolah terhadap Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 89-101.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sari, R. (2020). Studi tentang Kesenjangan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Sosial*, 5(4), 123-134.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Knopf.

KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR TENTANG IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN

- Widyastuti, D. (2020). Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Zonasi Sekolah. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(2), 90-101.
- Zainuddin, A. (2019). *Zonasi Sekolah dalam Konteks Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan.
- Zubaidah, S. (2020). *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Malang: Universitas Negeri Malang.